

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah pembangunan di negara-negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan terbatasnya fasilitas dan kecilnya daya tampung sekolah yang ada, serta tingginya angka putus sekolah. Hasil penelitian Komisi Internasional mengenai Pembangunan Pendidikan, seperti dikemukakan Coombs (1973, h.28), menunjukkan bahwa dari jumlah anak usia sekolah dasar di negara-negara berkembang, hanya sekitar 60 persen saja yang tertampung di sekolah-sekolah formal, dan dari padanya hanya kira-kira 10 persen saja yang dapat menyelesaikannya sampai kelas IV. Ini berarti angka putus sekolah mencapai tingkat sekitar 90 persen. Keterangan lain dari komisi tersebut menyebutkan:

... in 1968, only four out of ten primary-school-age-children in Africa were actually in classes. In the Arab States only half attended school. Forty-five per cent of Asia's children and 25 per cent in Latin America were similarly not enrolled (Coombs, 1973, h. 28).

Masalah putus sekolah (school drop-outs) merupakan salah satu masalah besar di negara-negara berkembang. Angka putus sekolah menunjukkan peningkatan yang terus-

menerus dari tahun ke tahun. Tabel 1 berikut ini memberikan gambaran angka putus sekolah tersebut.

TABEL 1 : JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH (DALAM JUTAAN)

	Usia 6-11 Thn			Usia 12-17 Thn		
	Tahun					
	1965	1975	1985	1965	1975	1985
Negara-Negara Maju	9	7	7	24	19	12
Negara-Negara Berkembang	110	121	130	139	173	197
(a) Afrika	30	32	24	32	37	41
(b) Amerika Latin	14	11	9	18	19	19
(c) Asia	66	77	86	88	115	137

Sumber : UNESCO, 1977

Situasi kependidikan di Indonesia, walaupun mungkin keadaannya relatif lebih baik, namun inti permasalahannya tetap sama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, masih besarnya kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah yang tertampung di sekolah, dan tingkat putus sekolah yang masih tinggi. Hasil sensus tahun 1980 menunjukkan proporsi anak usia sekolah yang tertampung di sekolah (bersekolah) sebagai berikut: 84,76 persen untuk

anak usia SD, 34,07 persen untuk anak usia SMP, dan 10,91 persen untuk anak usia SMA. Data itu menunjukkan bukan saja rendahnya kualitas pendidikan penduduk Indonesia, akan tetapi juga proporsi anak yang tidak sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah, terutama ke tingkat sekolah lanjutan, masih sangat besar. Jumlah anak putus sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas diperkirakan sekitar satu juta orang. Diantaranya sekitar 15 persen berasal dari SMA saja. Implikasi dari keadaan tersebut ialah: rendahnya tingkat pengetahuan dasar, kurangnya ketrampilan, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya produktivitas, yang kesemuanya merupakan faktor penyebab timbulnya kemiskinan terutama di daerah pedesaan.

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan masalah besar lain yang dihadapi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang yang agraris, dimana lebih dari 80 persen penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, maka justru di sanalah sebagian besar kemiskinan dan keterbelakangan berada. Penduduk pedesaan pada umumnya hidup dalam "kesederhanaan" dalam kombinasi kemiskinan dan kebutaan pengetahuan dan ketrampilan, yang bercirikan: angka kelahiran tinggi, tingkat

penghasilan yang rendah, mutu gizi makanan rendah, dan gejala pengangguran yang merajalela. Suatu kenyataan yang berkaitan dengan masalah itu ditunjukkan oleh angka-angka hasil sensus 1980 mengenai persentase angkatan kerja menurut jenjang pendidikan sebagai berikut: dari jumlah angkatan kerja sebanyak k.l. 55 juta orang, 88,4 persen tidak pernah sekolah, tidak tamat SD dan yang tamat SD; 6,4 persen tamat SMP, 3,6 persen tamat SMTA dan hanya 0,6 persen yang berpendidikan akademi/Perguruan Tinggi (Suharsono Sagir, 1984, h. 5).

Pengangguran juga merupakan bagian dari kemiskinan dan keterbelakangan. Anak-anak putus sekolah dan mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah merupakan calon-calon pengangguran yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Untuk Jawa Barat saja menurut hasil sensus 1980, dari jumlah penduduk sebanyak 27 juta jiwa, tidak kurang dari satu juta orang termasuk kategori penganggur, terutama terdiri dari anak-anak dan remaja putus sekolah dan mereka yang tidak bisa meneruskan sekolah. Tabel 2 dibawah ini akan menunjukkan angka-angka yang berkaitan dengan masalah pengangguran di Jawa Barat. Angka-angka tersebut memperlihatkan kenaikan jumlah pengangguran yang cukup berarti antara tahun 1978 sampai tahun 1983. Dari tabel itu juga dapat diketahui

jumlah orang yang tidak bekerja akan mencapai k.1 10 juta atau sekitar 60 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja, jika kedalamnya dihitung mereka yang berstatus tidak punya pekerjaan tetap.

TABEL 2 : JUMLAH PENDUDUK DAN STATUS PEKERJAAN DI JAWA BARAT

Penduduk	1978	1983
Jumlah Penduduk	24.214.135	28.665.726
Tenaga Kerja (10 tahun keatas)	16.150.862	17.919.439
Tidak Punya Pekerjaan tetap	7.447.849	8.296.700
Pencari Kerja	1.091.706	1.211.316
Bekerja	6.366.083	7.085.381

Sumber: Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (tidak bertahun).

Kemiskinan, baik yang bersifat material maupun kemiskinan akan pengetahuan dan ketrampilan yang meliputi sebagian besar penduduk negara-negara berkembang, berkaitan erat dengan gejala-gejala lain seperti: ledakan jumlah penduduk, sempit dan terbatasnya lapangan kerja, dan tingkat produktivitas yang rendah. Dubey (1972)

mengidentifikasi kemiskinan sebagai "... lack of education, poor health, the absence of marketable skills, and the unstable family life of the poor as causes of their poverty" (Zaltman, et al, 1972, h. 507). Sementara itu Emil Salim dalam buku "Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan" (1980) mengemukakan ciri-ciri kaum miskin sebagai "kelompok penduduk yang kurang berkesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang cukup bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan dan komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya" (Emil Salim, 1980, h. 19).

Kemiskinan dan keterbelakangan oleh Suzane Kindervater diidentifikasi sebagai "serba kekurangan" atau "serba ketinggalan" (lack or lag), baik yang bersifat material maupun kekurangan dan ketinggalan dalam pendidikan dan perkembangan teknologi (Kindervater, 1979, h. 19-20). Kemiskinan massal sebagai gejala umum di negara berkembang diprihatinkan pula oleh Kereet Joshe dalam pidato penutupan Lokakarya Pendidikan Kedesaan di New Delhi (17-26 Maret 1977) sebagaimana dikemukakan oleh Napitupulu (1980, h. 60) sebagai berikut:

Sebagai negara yang sedang berkembang, kita menghadapi masalah-masalah yang hampir bersamaan: masalah pertumbuhan penduduk, masalah kemiskinan terutama di pedesaan, masalah buta huruf dan masalah keterlantaran pendidikan bagi sebagian anak usia sekolah.



The Independent Commission on International Development Issues (1980, h. 59) mengungkapkan bahwa kaum miskin di India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia dan hampir di semua negara Afrika masih berjumlah sekitar 70 persen atau lebih dari jumlah penduduk yang hidup di daerah pedesaan.

Berdasarkan asumsi bahwa kemiskinan dan keterbelakangan sangat erat berkaitan dengan kekurangan pengetahuan dasar dan ketrampilan, maka usaha meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa melalui pendidikan merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan pedesaan pada umumnya. Pembangunan pedesaan melalui pendekatan pendidikan dimaksudkan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber daya produktif, seperti dikemukakan oleh Schumacher bahwa manusialah, dan bukan alam, yang merupakan sumber daya utama. Faktor utama semua pembangunan ekonomi lahir dari akal budi manusia. Dan dari semua sumber daya tersebut, pendidikan adalah yang terpenting (Schumacher, 1979, h. 75).

Dalam hubungan pembangunan melalui pendidikan ini, program pendidikan luar sekolah turut memegang peranan penting dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Berbagai bentuk program PLS telah banyak dikem -

bangkan dan dilaksanakan seperti: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Balai Latihan Ketrampilan Industri (BLKI) dan Balai Latihan Ketrampilan Pertanian (BLKP), Proyek Panong dan lain-lainnya. Oleh karena pembangunan nasional pada dasarnya adalah pembangunan pedesaan, maka program-program pembangunan dan program-program pendidikan luar sekolah terutama ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa. "Rural development programmes must then be, first and foremost, human resources development.... Non-formal education programmes must first be directed to uplift rural life and to help the have-nots in the rural areas" (Napitupulu, 1979, h. 9).

Salah satu bentuk Pendidikan Luar Sekolah yang tengah digalakan Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah Latihan Ketrampilan Keliling (LKK). Dalam hubungan pembangunan pedesaan, LKK yang mulai diperkenalkan dan dilaksanakan tahun 1978, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan keterlantaran pendidikan. Salah satu rumusan tujuannya menyebutkan bahwa maksud dan tujuan LKK ialah menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dasar maupun peningkatan mutu pekerjaan dari para pemuda penganggur/pencari kerja di desa-desa di seluruh Jawa Barat, untuk



menciptakan lapangan usaha baru yang menunjang program pembangunan daerahnya.

Jika kita perjatkan rumusan tujuan tersebut di atas tampak bahwa program LKK mempunyai jangkauan jauh ke depan, yaitu pengembangan swadaya masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan model pembangunan "self help", yang dalam pengertian dan konteks pembangunan yang lebih luas berarti juga terjadinya proses perubahan sosial. Pendidikan dalam segala bentuknya pada hakekatnya memang mengarah kepada perubahan sosial, karena pendidikan selain berfungsi sebagai pewarisan nilai-nilai sosial budaya yang ada juga pemberian dan pemindahan pengetahuan-pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang berjangkauan masa depan. Pendidikan adalah suatu proses transformasi untuk mengubah tingkah laku baik individual maupun kelompok, dan perubahan tingkah laku merupakan bagian atau unsur dari perubahan sosial.

## 2. Masalah Yang Diteliti

Setiap program pendidikan dan latihan diselenggarakan dan di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan LKK dikemukakan sasaran po-

kok penyelenggaraan Latihan Ketrampilan Keliling sebagai berikut:

- (a) Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan kerja dengan jalan pemerataan pendidikan/latihan dan kesempatan kerja.
- (b) Tersedianya tenaga kerja yang benar-benar berkemampuan dan berkemauan guna mengisi pekerjaan/jabatan yang tersedia atau penumbuhan dan pengembangan usaha-usaha wiraswasta.
- (c) Teratasinya masalah kekurangan tenaga kerja yang cakap dan terampil di pedesaan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam meratakan jalannya proses transformasi struktural.

Untuk tercapainya sasaran pokok tersebut, maka kegiatan LKK diarahkan kepada sasaran populasi (target group) sebagai berikut:

- (a) Golongan remaja atau para pemuda putus sekolah atau mereka yang telah menyelesaikan sekolah dan bermaksud memasuki lapangan kerja.
- (b) Para penganggur dan pencari kerja yang ingin mendapatkan lapangan kerja atau bekerja mandiri.
- (c) Para santri dan anak-anak Pejuang dan Perintis Kemerdekaan, LVRI dan Pepabri.

- (d) Tenaga kerja Hendaya (cacat) dan ex nara pidana.
- (e) Para pengemis, gelandangan, orang terlantar dan WTS.
- (f) Tenaga kerja yang membutuhkan ketrampilan lain dalam rangka alih tugas.
- (g) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI yang membutuhkan bekal ketrampilan dalam memasuki MPP, para pengusaha kecil dan menengah untuk maksud pengembangan produktifitas dan wiraswasta, dan lain-lain. (Buku Petunjuk Pelaksanaan Latihan Ketrampilan Keliling, 1981, h. 4 dan 5).

Program kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh respons warga masyarakat itu sendiri. Keterlibatan dan keikut-sertaan warga masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai respons dan merupakan faktor yang penting pula dalam menentukan keberhasilan program.

Intensitas keikut-sertaan orang dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: oleh kebutuhan-kebutuhannya, tujuan-tujuannya, kondisi dan latar belakang kehidupannya. Atau dengan perkataan lain, intensitas keikut-sertaan dipengaruhi dan berkaitan dengan motivasi-motivasi dan latar belakang

sosial ekonomi.

Yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah masalah bagaimana intensitas keikut-sertaan warga masyarakat, khususnya warga belajar peserta program LKK, dan sejauh mana intensitas keikut-sertaan tersebut dipengaruhi oleh dan kait mengait dengan faktor-faktor motivasi dan latar belakang sosial ekonomi.

Atas dasar rumusan masalah penelitian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan variabel-variabel sebagai berikut:

- (1) Variabel keikut-sertaan sebagai variabel takbebas atau variabel terpengaruh, atau disebut juga sebagai variabel tergantung (dependent variable).
- (2) Variabel motivasi sebagai variabel pengaruh atau variabel bebas (independent variable).
- (3) Variabel latar belakang sosial ekonomi, juga merupakan variabel pengaruh atau variabel bebas (independent variable).

(1) Variabel keikut-sertaan

Keikut-sertaan warga masyarakat dalam program dan proses pembangunan merupakan sesuatu hal yang selalu ditekankan. Penekanan akan pentingnya keikut-sertaan

warga masyarakat dalam proses pembangunan didasarkan atas anggapan bahwa masyarakat bukanlah obyek dan sasaran pembangunan semata-mata, akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Dengan demikian program pembangunan tidak menitik beratkan pembangunan yang bersifat materi semata, akan tetapi juga meningkatkan pendaya gunaan sumber daya manusia. Hal itu jelas dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut:

Pembangunan Nasional dilaksanakan d dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya (Tap MPR No. IV/MPR/1978).

Keikut-sertaan warga masyarakat dalam program menurut sifatnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: keikut-sertaan secara pasif dan keikut-sertaan secara aktif. Keikut-sertaan secara pasif adalah keikut-sertaan dimana warga masyarakat tidak menolak suatu program. Sedangkan keikut-sertaan secara aktif adalah keikut-sertaan dimana warga masyarakat menerima dengan tegas program-program pembangunan dan bahkan aktif mengajak warga masyarakat yang lainnya untuk memperluas jangkau-

an dan meningkatkan hasil dari program yang dilaksanakan, karena berhasilnya program yang dirasakan masyarakat sebagai keberhasilan masyarakat itu sendiri. (Santoso, 1978, h. 140). Keikut-sertaan secara pasif, dengan demikian adalah keikut-sertaan seadanya atas dasar ikut-ikutan, sedangkan keikut-sertaan secara aktif dilandasi oleh dorongan, kemauan dan kesadaran yang tinggi akan manfaat sesuatu program. Kedua-duanya dipengaruhi baik oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri warga masyarakat itu sendiri (faktor kepribadian) maupun faktor-faktor yang berasal dari luar pribadinya.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, maka keikut-sertaan warga belajar program LKK adalah variabel tergantung atau variabel terpengaruh (dependent variable), yang berarti dapat dipengaruhi atau mempunyai kaitan dengan variabel lain.

## (2) Variabel motivasi

Motivasi merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Banyak para ahli telah mengemukakan pentingnya peranan motivasi yang mendasari arah dan tindakan manusia. Beberapa penulis yang pendapatnya dihimpun oleh Skinner umumnya berpendapat bahwa motivasi merupakan faktor sentral dalam pendidikan (Skinner,



1959, h. 451). Krech dalam bukunya "Individual in Society" (1962) mengemukakan pentingnya motivasi sebagai aspek kepribadian seseorang yang merupakan semacam tenaga pendorong mengapa seseorang itu memilih tindakan tertentu sesuai dengan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuannya. Ia membagi tenaga pendorong semacam itu ke dalam dua macam, yaitu positif dan negatif. Pengertian-pengertian seperti "keinginan" (wants), "pendambaan" (desires), "kebutuhan" (needs) biasanya dipandang sebagai tenaga-tenaga positif yang mendorong seseorang ke arah obyek atau kondisi tertentu. Sedangkan pengertian-pengertian seperti "ketakutan" (fears) dan "kebencian" (aversions) umumnya dipandang sebagai tenaga-tenaga negatif yang mendorong seseorang untuk menolak atau menjauhi sesuatu obyek atau kondisi tertentu (Krech, et al. 1962, p. 68-69).

Pentingnya motivasi bagi warga masyarakat dalam mengikuti program LKK, ialah karena motivasi akan menentukan arah dan kemantapan tindakan warga masyarakat peserta program tersebut yang akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap keberhasilan program.

Dalam penelitian ini motivasi dipandang sebagai variabel bebas (independent variable). Ini berarti

bahwa variabel motivasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain.

(3) Variabel latar belakang sosial ekonomi.

Masyarakat memiliki keragaman anggotanya berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Di dalam masyarakat terjadi atau terdapat pengelompokan dan penggolongan warganya atas dasar keragaman itu. Pengertian-pengertian seperti struktur sosial, kelas sosial, pelapisan sosial merupakan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan pengelompokan dan penggolongan masyarakat tersebut, dimana masing-masing kelompok mencerminkan pula status dan peran anggotanya dalam masyarakat. Davis menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak berkelas-kelas, dan latar belakang sosial ekonomi biasanya merupakan unsur utama yang menentukan status sosial warga masyarakat (Davis, 1948, h. 366 dan 374).

Pengelompokan dan penggolongan di dalam masyarakat dapat didasarkan atas beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, bahasa, agama dan lain-lainnya. Akan tetapi penggolongan berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan tingkat kemampuan ekonomi biasanya merupakan penggolongan yang paling menonjol. Atas

dasar itu kita mengenal adanya golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Atau kelas atas (Upper Class), kelas menengah (Middle Class), dan kelas bawah (Lower Class) (Krech, 1962, h. 314). Masing-masing kelompok, kelas atau lapisan tersebut membentuk lingkungan sosialnya sendiri yang mempengaruhi aspirasi-aspirasi, motivasi-motivasi, tindakan dan tingkah laku anggotanya. Setiap kelompok atau golongan dalam masyarakat memperlihatkan karakteristik tersendiri yang membedakan dirinya dari kelompok lain.

Atas dasar pemikiran di atas, maka variabel latar belakang sosial ekonomi dalam penelitian ini dipandang sebagai variabel bebas pula (independent variable) seperti halnya motivasi.

### 3. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam studi ini adalah masalah intensitas keikutsertaan warga belajar program LKK, yang perumusannya adalah: Bagaimana intensitas keikutsertaan warga belajar program LKK yang ada, dan sejauh mana intensitas keikutsertaan tersebut dipengaruhi oleh dan kait mengait dengan faktor-faktor motivasi dan latar belakang sosial ekonomi?

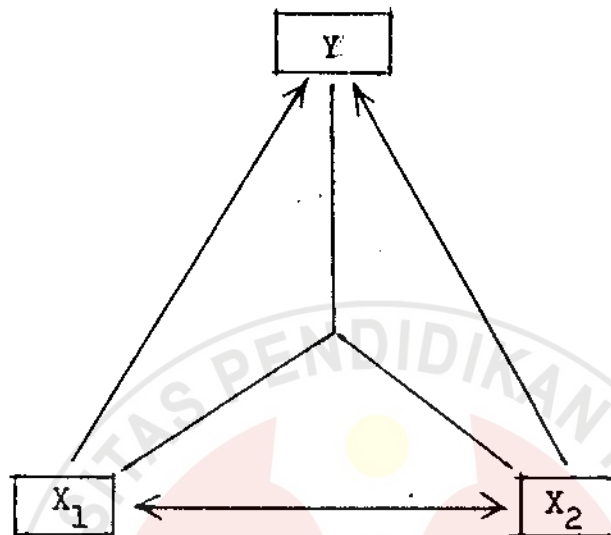
Untuk lebih memperjelas dan mempertegas masalah

tersebut, maka disusunlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana intensitas keikut-sertaan warga belajar peserta program LKK yang ada?
- (2) Apakah ada perbedaan intensitas keikut-sertaan itu antara kelompok-kelompok peserta, baik berdasarkan jenis dan lokasi program maupun latar belakang sosial ekonomi?
- (3) Apakah terdapat hubungan fungsional antara intensitas keikut-sertaan dengan motivasi dan latar belakang sosial ekonomi? Jika ada bagaimana sifat hubungan itu?
- (4) Apakah terdapat hubungan yang berarti dilihat secara korelasional antara intensitas keikut-sertaan dengan motivasi dan latar belakang sosial ekonomi?

Jika rumusan masalah seperti dikemukakan di atas digambarkan dalam suatu model, maka akan didapat suatu model hubungan antar variabel seperti tampak di halaman berikut. Berdasarkan model hubungan itu akan terlihat bagaimana pola hubungan antara bebas (independent variables) dengan variabel takbebas (dependent variable), dimana variabel takbebasnya adalah intensitas keikut-sertaan.

MODEL HUBUNGAN ANTARA VARIABEL  
SECARA HIPOTETIK



Keterangan: Y = Intensitas Keikut-sertaan  
X<sub>1</sub> = Motivasi  
X<sub>2</sub> = Latar belakang sosial ekonomi

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

LKK adalah suatu program pendidikan ketrampilan yang dicanangkan dari atas dan ditujukan kepada warga masyarakat di pedesaan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu keikut-sertaan warga masyarakat yang menjadi sasaran -

nya merupakan masalah yang penting untuk dikaji. Berhasil tidaknya suatu program bagaimanapun baiknya direncanakan, tergantung kepada derajat dan intensitas keikut-sertaan warga masyarakat yang menjadi sasaran program itu.

Dikaitkan dengan masalah motivasi dan latar belakang sosial ekonomi, maka penelaahan terhadap keikut-sertaan warga masyarakat dalam program menjadi lebih penting lagi. Kedudukan motivasi sebagai salah satu aspek atau dimensi kepribadian, bagi orang dewasa merupakan sumber penggerak dan pendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Tanpa motivasi yang kuat dari warga belajarnya, maka dapat diramalkan bahwa program akan mengalami kegagalan.

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan dan memberi gambaran tentang intensitas keikut-sertaan warga belajar program LKK di Cikancung dan Lembang, mengungkapkan karakteristik internal, khususnya motivasi yang menjadi dasar dan dorongan dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya sebagai peserta LKK, dan latar belakang sosial ekonomi. Mengungkapkan sejauh mana intensitas keikut-sertaan tersebut mempunyai hubungan dan kait mengait dengan faktor motivasi dan latar belakang sosial ekonomi.



Hasil penelitian ini diharapkan selain bermanfaat untuk menguji konsistensi teori tentang peranan motivasi dan latar belakang sosial ekonomi terhadap tingkat dan intensitas keikut-sertaan seseorang dalam suatu program, tetapi juga dapat memberikan sumbangan pikiran dan informasi berdasarkan fakta empirik sebagai bahan masukan bagi usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas program.

#### 5. Batasan Istilah

Keikut-sertaan warga masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan keikut-sertaan dalam peranannya sebagai warga belajar pendidikan ketrampilan. Yang akan diukur ialah berapa besar atau berapa tinggi intensitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan peran dan keikut-sertaannya sebagai warga belajar, seperti kegiatannya dalam mengikuti pelajaran, kegiatan dalam kelompok belajar di kelas dan di luar kelas, kegiatan belajar mandiri, dan kegiatan lain yang mengarah kepada keberhasilan program.

Motivasi merupakan aspek kepribadian yang penting, semacam tenaga yang mendorong seseorang dalam memilih sesuatu kegiatan atau tindakan. Krech menyatakan ada hubungan yang erat antara motivasi dengan

faktor "wants and goals", bahwa pikiran dan tindakan individu mencerminkan keinginan dan tujuannya (Krech, 1962, h. 70). Dalam penelitian ini motivasi akan lebih ditekankan kepada penelaahan mengenai alasan-alasan, keinginan-keinginan serta tujuan yang ingin dicapai warga belajar program LKK, terutama keinginan dan motivasi untuk berprestasi seperti yang dikemukakan McClelland.

Latar belakang sosial ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Latar belakang sosial ekonomi turut mewarnai tindakan, sikap dan pikiran manusia. Adanya stratifikasi sosial mencerminkan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda antar kelompok dan lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan latar belakang sosial ekonomi adalah latar belakang keluarga (termasuk status dan peran orang tua), pendidikan, status pekerjaan dan mata pencaharian, serta kekayaan.